



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)



**DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2015**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan Lakip	2
1.3 Struktur Organisasi	4
1.4 Maksud dan Tujuan LAKIP 2015	7
1.5 Sistematika LAKIP 2015	8

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	9
2.1 Pernyataan Visi dan Misi	9
2.2 Tujuan dan Sasaran	10
2.3 Rencana Strategis Unit Kerja	12
2.4 Rencana Kinerja Tahun 2015	14
B. REALISASI ANGGARAN	15
3.1 Pengukuran Kinerja Keuangan Tahun 2015	15
3.2 Pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015	18

BAB IV PENUTUP	29
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah Swt Tuhan seru sekalian alam, atas berkat-Nya jualah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat dan masih dapat berkarya di negeri serumpun sebalai ini. LAKIP merupakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai alat penilaian kinerja secara kuantitatif dan wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menuju terwujudnya *Good Governance* dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Penyusunan LAKIP Tahun 2015 dilaksanakan atas dasar analisis pengukuran capaian kinerja program dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga Laporan Akuntabilitas ini bermanfaat dan akan digunakan sebagai bahan peningkatan serta perbaikan kinerja selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr, Wb.

Pangkalpinang, Februari 2016
Kepala Dinas



Drs. H. YULIZAR ADNAN, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 196307171989031009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan *Good Governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), bahwa Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Penyusunan laporan kinerja DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015, mengacu kepada Revisi Rencana Strategis DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012 – 2017, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012 -2017, Rencana Kinerja tahun 2016 DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan penjabaran dari rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 yang merupakan dokumen

perencanaan Pembangunan tahunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan LAKIP

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 21 Februari 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tugas pokok DPPKAD adalah “melaksanakan kewenangan Desentralisasi, tugas Dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan Asset Daerah”. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, DPPKAD memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan dan Asset Daerah;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/ Kota dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- e. Pengelolaan Urusan Kesekretariatan.

Dasar hukum kewenangan DPPKAD dalam pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Asset Daerah terdapat dalam berbagai peraturan diantaranya:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP);
16. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri A);
19. Peraturan Daerah No.14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 No.3 Seri A).
20. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2015 No.7 seri A).

1.3 Struktur Organisasi

Organisasi DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tertulis pada Pasal 66 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2008 dengan susunan sebagai berikut :

- 1) Kepala DPPKAD
- 2) Sekretaris, yang membawahi Sub Bagian :
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Kepegawaian
- 3) Kepala Bidang Pajak, yang membawahi Seksi-seksi :
 - a. Seksi Teknis Perpajakan
 - b. Seksi Sengketa Pajak dan Doleansi
 - c. Seksi Penyusunan Program, Pengendalian dan Evaluasi Pajak
- 4) Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, yang membawahi Seksi-seksi:
 - a. seksi Teknis Retribusi
 - b. Seksi Sumbangan, Bagi Hasil dan Penerimaan Lain-lain
 - c. Seksi Pengendalian dan Evaluasi
- 5) Kepala Bidang Anggaran, yang membawahi Seksi-seksi:
 - a. Seksi Anggaran Belanja I

- b. Seksi Anggaran Belanja II
 - c. Seksi Pembinaan Daerah Bawahan
- 6) Kepala Bidang Akutansi dan Pelaporan, yang membawahi Seksi-seksi :
- a. Seksi Pembukuan Anggaran Belanja
 - b. Seksi Pembukuan Anggaran Pendapatan
 - c. Seksi Neraca Daerah
- 7) Kepala Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi, yang membawahi Seksi-seksi:
- a. Seksi Perbendaharaan Belanja I
 - b. Seksi Perbendaharaan Belanja II
 - c. Seksi Verifikasi
- 8) Kepala Bidang Asset Daerah, yang membawahi Seksi-seksi :
- a. Seksi Perlengkapan
 - b. Seksi Penyimpanan dan Penghapusan
 - c. Seksi Perencanaan Kebutuhan Inventaris

Organisasi Unit Pelaksana Teknis DPPKAD memiliki struktur organisasi yang sama pada setiap UPT DPPKAD dengan susunan sebagai berikut:

- 1) Kepala UPTD
- 2) Sub Bagian Tata Usaha
- 3) Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penagihan
- 4) Seksi Penetapan, Pembukan dan Pelaporan
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional

Tingkat hierarki jabatan dan hubungan kerja sebagaimana Gambaran organisasi diatas dapat dilihat pada bagan struktur organisasi terlampir.

1.3. A. Jumlah Pegawai

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, DPPKAD memiliki keadaan kekuatan pegawai dengan klasifikasi berdasarkan pangkat dan eselon sebagai berikut:

- 1) Keadaan Pegawai DPPKAD Berdasarkan Pangkat/Golongan per Desember 2015.

No	UNIT KERJA	BERDASARKAN GOLONGAN										Total
		Gol I		Gol II		Gol III		Gol IV		Jumlah		
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	
1	DPPKAD	0	1	22	21	44	42	9	0	75	64	139
2	UPT. PANGKALPINANG	0	0	5	10	12	5	0	0	17	15	32
3	UPT. BANGKA	0	0	11	4	10	10	1	0	22	14	36
4	UPT. BANGKA BARAT	0	0	3	2	5	2	0	0	8	4	12
5	UPT. BANGKA TENGAH	0	0	3	1	7	3	1	0	11	4	15
6	UPT BANGKA SELATAN	0	0	0	2	6	1	0	0	6	3	9
7	UPT.BELITUNG	0	0	6	2	11	4	1	0	18	6	24
8	UPT.BELITUNG TIMUR	0	0	5	2	6	2	1	0	12	4	16
		0	1	57	49	81	57	10	0	148	107	283

2) Keadaan Pegawai DPPKAD Berdasarkan Eselon per Desember 2015.

No	UNIT KERJA	BERDASARKAN ESELON										Total
		Eselon II		Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah		
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	
1	DPPKAD	1	0	7	0	12	9	56	55	75	64	139
2	UPT. PANGKALPINANG	0	0	1	0	2	1	14	14	17	15	32
3	UPT. BANGKA	0	0	1	0	2	1	19	13	22	14	36
4	UPT. BANGKA BARAT	0	0	1	0	3	0	4	4	8	4	12
5	UPT. BANGKA TENGAH	0	0	1	0	2	1	8	3	11	4	15
6	UPT BANGKA SELATAN	0	0	1	0	2	1	3	2	6	3	9
7	UPT.BELITUNG	0	0	1	0	2	1	15	5	18	6	24
8	UPT.BELITUNG TIMUR	0	0	1	0	2	1	9	3	12	4	14
		1	0	14	0	27	15	128	99	169	114	283

3) Formasi Kepegawaian Tahun 2015 dan Kebutuhan tahun 2016

No	ESELON / STAF	FORMASI	TERISI	BELUM TERISI
1	Eselon II	1	1	0
2	Eselon III	14	14	0
3	Eselon IV	42	42	0
4	Staf	240	226	14

	Jumlah	297	283	14
--	---------------	-----	-----	----

1.4 Maksud dan Tujuan LAKIP 2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara atas laporan kinerja instansi pemerintah. Permenpan ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal Organisasi, LAKIP 2015 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 atas capaian kinerja merujuk pada sampai sejauhmana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis dicapai selama tahun 2015.
- Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2015 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagi upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa mendatang.

1.5 Sistematika LAKIP 2015

Sistematika / Instrumen yang digunakan dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi DPPKAD, terdiri dari komponen yang merupakan satu kesatuan berupa:

1) Bab I - Pendahuluan;

2) Bab II - Perencanaan Kinerja;

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

3) Bab III - Penutup.

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

2.1 Pernyataan Visi dan Misi

Agar DPPKAD tetap eksis, antisipatif dan inovatif dimasa depan, DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai cara pandang kedepan yang dituangkan dalam visi sebagai berikut :

“Terwujudnya pendapatan, pengelolaan keuangan, dan asset daerah yang optimal, akuntable, dan akurat.”

Dalam pencapaian visinya, DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki Misi sebagai tahap-tahap/langkah-langkah yang akan dilaksanakan guna mewujudkan keadaan dimasa depan yang diinginkan, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dibidang Perpajakan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
- 2) Mewujudkan kebijakan Pendapatan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai alat untuk melakukan fungsi, Alokasi, Distribusi dan Stabilisasi.
- 3) Meningkatkan efektifitas manajemen dan pengelolaan keuangan daerah.
- 4) Meningkatkan keselarasan antar Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD dalam Tahun Anggaran.
- 5) Meningkatkan Penyediaan Administrasi Asset yang akurat.
- 6) Meningkatkan pelayanan publik dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
- 7) Mewujudkan sistem informasi yang terintergerasi.
- 8) Meningkatkan penerimaan Daerah dengan melalui peningkatan kualitas pelayanan yang prima pada masyarakat, khususnya masyarakat wajib pajak (WP).

- 9) Meningkatkan penyediaan prasarana, guna menunjang intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- 10) Mewujudkan data dan informasi perpajakan yang komprehensif, akurat, reliable, transparan dan dapat diakses oleh masyarakat.
- 11) Mewujudkan komunikasi, pengiriman data dan transaksi secara cepat, transparan, akuntabel dan reliable, antara DPPKAD dengan wajib pajak, juga antara DPPKAD dengan unit kerja sejenis di setiap Kabupaten/Kota.
- 12) Meningkatkan pengelolaan data dan menginformasikan kepada masyarakat dan mitra kerja mengenai potensi serta peranan pajak dan retribusi daerah maupun pendapatan lain-lain terhadap pembangunan daerah.
- 13) Mengoptimalkan kerja sama dan hubungan dengan masyarakat (*community development*) yang berkompeten dengan meningkatkan dan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah maupun pendapatan lain-lainnya.
- 14) Mewujudkan organisasi DPPKAD sebagai organisasi yang mau terus belajar (*Learning Organization*), beradaptasi dengan lingkungan, menerapkan teknik dan inovasi yang baru, dalam mewujudkan tujuan organisasi.

2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dibidang pendapatan, keuangan dan asset daerah serta penyediaan secara kualitas prasarana untuk mengoptimalkan pelayanan .
- 2) Menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan aparatur dalam melayani wajib pajak dan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak.
- 3) Menciptakan komunikasi dan kerjasama yang kondusif dengan/antar mitra kerja dalam rangka mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

- 4) Menciptakan Bank Data Pendapatan daerah, keuangan dan asset daerah, sebagai bahan analisis dalam rencana pengembangan dan peningkatan.
- 5) Membina/menjalin hubungan kehumasan/ kerja sama dengan media cetak, media elektronik dalam hal menginformasikan tentang masalah-masalah yang berkenaan dengan pendapatan daerah, keuangan dan asset daerah.
- 6) Merencanakan pengembangan, penggalan, pengevaluasian, dan pengendalian serta monitoring sumber Pendapatan Daerah.
- 7) Mengupayakan usaha/kegiatan peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah.
- 8) Melaksanakan Pencapaian target penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2016.

Sasaran (program, kebijakan, kegiatan) DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

- 1) Terwujudnya SDM perpajakan, pengelolaan keuangan dan Asset Daerah yang berkualitas.
- 2) Meningkatkan target penerimaan pendapatan daerah.
- 3) Terlaksananya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan keuangan daerah.
- 4) Tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan daerah.
- 5) Tersusunnya penerbitan administrasi asset.
- 6) Terlaksananya pelayanan publik dan administrasi perkantoran yang prima.
- 7) Terlaksananya sistem informasi manajemen yang terintergerasi.
- 8) Terlaksananya kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas SDM dalam bidang perpajakan, pengelolaan keuangan dan asset daerah, serta Penyediaan sarana dan prasarana untuk penunjang operasional penerimaan pendapatan daerah, yang dilaksanakan dengan program:
 - a. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat untuk operasional Pendapatan Daerah;
 - b. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan SDM aparatur bidang Pendapatan, pengelolaan keuangan dan

asset Daerah guna peningkatan kualitas pelayanan masyarakat;

c. standarisasi pelayanan.

- 9) Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya dalam rangka peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah maupun pendapatan lain-lainnya.
- 10) Terencananya pengembangan, penggalan, pengevaluasian, dan pengendalian sumber-sumber Pendapatan Daerah yang telah ada maupun yang belum ada.
- 11) Terbinanya hubungan kehumasan dan terjalinnya koordinasi dan kerja sama yang harmonis dengan mitra kerja untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah maupun pendapatan lain-lainnya.
- 12) Tersedianya data-data perpajakan daerah, data retribusi daerah maupun pendapatan lain-lainnya.
- 13) Adanya informasi yang akurat dan representatif, baik melalui media cetak maupun media elektronik mengenai pendapatan daerah.
- 14) Terlaksananya kegiatan-kegiatan usaha peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah , melalui program :
 - a. pendataan objek pajak baru dan lama;
 - b. penggalan potensi dan jenis-jenis Pendapatan Daerah ;
 - c. peningkatan intensifikasi penagihan pajak;
 - d. penyusunan Peraturan daerah tentang pajak, retribusi, pungutan, provisi serta pendapatan lain yang sah.
- 15) Tercapainya target penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2016.
- 16) Terencananya pengadaan dan pendistribusian kebutuhan rutin untuk keperluan operasional administrasi umum.
- 17) Terpeliharanya dan terinventarisirnya peralatan kantor dengan baik.

2.3 Rencana Strategis Unit Kerja

Perencanaan strategi merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis merupakan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja, sasaran yang ingin diraih, dan bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi.

Rencana Strategis Unit Kerja Tahun 2016 dapat dijabarkan dalam tabel rencana program dan kegiatan sebagai berikut:

No.	PROGRAM	RENCANA KEGIATAN
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan 10. Penyediaan bahan Logistik Kantor 11. Penyediaan Makanan dan Minuman 12. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 13. Jasa Penunjang dan pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 14. Jasa Pemeliharaan Sistem Pengajian PNS SKPD di Lingkungan Prov. Kep. Bangka Belitung 15. Koordinasi dan konsolidasi ke dalam Daerah 16. Operasional UPT DPPKAD Wilayah Kab. Bangka 17. Operasional UPT DPPKAD Wilayah Kota Pangkalpinang 18. Operasional UPT DPPKAD Wilayah Kab. Belitung 19. Pengelolaan Kehumasan pada DPPKAD
2	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD 2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang perubahan APBD 3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 4. Bimtek penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 5. Intensifikasi Sumber-sumber Pajak Daerah 6. Operasional Aplikasi SIPKD 7. Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD 8. Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2017 9. Penyusunan dan Penataan Arsip SP2D 10. Penyusunan Pergub tentang Standar Sarana dan Prasarana Pemerintahan Daerah 11. Pengalihan Asset Milik Pemerintah 7 Kabupaten/kota ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 2. Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang APBD TA.2017 3. Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang Perubahan APBD TA.2016 4. Evaluasi Raperda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 5. Rapat Koordinasi Pembinaan Keuangan Pemerintah

		Kabupaten/Kota.
4	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Musholla pada UPTD 2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 4. Pengadaan Peralatan gedung kantor 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir, dan Halaman Kantor 8. Pembangunan Tempat Parkir, Pagar, dan Sumur Bor Pada UPTD
5	Peningkatan Disiplin Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu 2. Advokasi perencanaan penganggaran responsif gender Provinsi Kep. Bangka Belitung
6	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
7	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
8	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Teknis Bendahara/Penyimpan Barang dan Pengurus Barang 2. Penyusunan Harga Satuan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3. Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 5. Penyusunan Perda dan Pergub tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 6. Pengamanan Barang Milik Daerah 7. Sertifikasi Lahan Milik Pemerintah Daerah
9	Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lain-lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Koordinasi PKB dan BBNKB dengan Instansi Terkait 2. Sosialisasi Pajak Daerah 3. Operasional dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah 4. Operasional Samsat Keliling 5. Penyusunan Pergub tentang Dasar pengenaan PKB dan BBNKB 6. Operasional Samsat Corner 7. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi dan pendapatan lain-lain 8. Rapat kerja retribusi daerah dan pendapatan lain-lain 9. Penyusunan Pergub tentang lain-lain PAD yang Sah

2.4 Rencana Kinerja Tahun 2016

Rencana Kinerja Tahun 2016 DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel : Perjanjian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini Pemeriksaan BPK (WTP=1, WDP=2, Disclaimer=3)	WTP

2	Meningkatnya kinerja Aparatur pemerintah daerah di dalam instansi DPPKAD maupun di SKPD lainnya	Peningkatan kompetensi aparatur pada SKPD	80%
3	Laporan keuangan SKPD yang baik dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Laporan Keuangan SKPD	30 SKPD
4	memperkuat instansi DPPKAD sesuai tugas pokok dan fungsinya	Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	3
5	sistem informasi keuangan daerah, pendapatan dan asset daerah yang baik dan benar yang dapat diyakini kebenarannya	Sistem Informasi Keuangan Daerah	80%

B. REALISASI ANGGARAN

3.1 Pengukuran Kinerja Keuangan Tahun 2015

- 1) Analisis Pencapaian Keuangan Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan sebesar Rp. 550.475.048.667,54 terealisasi sebesar Rp 579.399.455.731,67 atau sebesar 105,25 %.
- 2) Analisis Pencapaian Keuangan Target Penerimaan Dana Perimbangan yang ditetapkan sebesar Rp.1.179.487.500.000,00 terealisasi sebesar Rp 1.130.400.495.449,00 atau sebesar 95,84 %.
- 3) Analisis Pencapaian Keuangan Target Penerimaan Lain-lain pendapatan yang sah ditetapkan sebesar Rp 179.626.400.000,00 terealisasi sebesar Rp 184.795.250.000,00 atau sebesar 102,88 %.
- 4) Analisis Pencapaian Keuangan Belanja Operasi sebesar Rp 943.267.056.790,32 terealisasi Rp. 824.080.559.475,44 atau sebesar 87,36 %.

- 5) Analisis Pencapaian Keuangan Kegiatan Belanja Modal dari dana yang tersedia Rp 4.709.983.000,00 terealisasi Rp. 3.829.522.183,20 atau sebesar 81,31 %.
- 6) Analisis Pencapaian Keuangan Kegiatan Belanja Tidak Terduga dari dana yang tersedia Rp. 2.717.100.000,00 terealisasi Rp 95.176.365,45 atau sebesar 3,50 %.
- 7) Analisis Pencapaian Keuangan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dari dana yang tersedia Rp 5.000.000.000,00 terealisasi Rp. 5.000.000.000,00 atau sebesar 100 % dan sisa sebesar Rp 0,00.

Ringkasan APBD Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2015:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	PENDAPATAN				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	550.475.048.667,54	579.399.455.731,67	(28.924.407.064,13)	105,25%
1.1.1	Pajak Daerah	500.844.014.371,82	506.939.186.260,22	6.095.171.888,40	101,22%
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.500.000.000	5.243.416.236	(2.256.583.763,22)	69,91%
1.1.3	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	42.131.034.295,72	67.216.853.234,67	25.085.818.938,95	159,54%
1.2	Pendapatan Transfer	1.179.487.500.000,00	1.130.400.495.449,00	(49.087.004.551,00)	95,84%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.179.487.500.000,00	1.130.400.495.449,00	(49.087.004.551,00)	95,84%
1.2.2	Dana Bagi Hasil Pajak	62.437.442.000,00	47.461.053.900,00	(14.976.388.100,00)	76,01%
1.2.3	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	163.717.845.000,00	140.696.182.549,00	(23.021.662.451,00)	85,94%
1.2.4	Dana Alokasi Umum	897.887.443.000,00	897.887.443.000,00	-	100,00%
1.2.5	Dana Alokasi Khusus	55.444.770.000,00	44.355.816.000,00	(11.088.954.000,00)	80,00%
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	179.132.080.000,00	131.020.773.500,00	(48.111.306.500,00)	73,14%
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.3	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	179.626.400.000,00	184.795.250.000,00	5.168.850.000,00	102,88%
	Jumlah Pendapatan	1.909.588.948.667,54	1.894.595.201.180,67	(14.993.747.486,87)	99,21%
2	BELANJA				
2.1	Belanja Operasi	943.267.056.790,32	824.080.559.475,44	(119.186.497.314,88)	87,36%
2.1.1	Belanja Pegawai	45.009.073.480,50	42.487.591.491,25	(2.521.481.989,25)	94,40%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	17.969.610.282,00	13.067.107.627,00	(4.902.502.655,00)	72,72%
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	290.657.345.000,00	257.906.625.000,00	(32.750.720.000,00)	88,73%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.228.500.000,00	695.500.000,00	(533.000.000,00)	56,61%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes	332.323.833.855,82	303.413.474.842,19	(28.910.359.013,63)	91,30%
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes	256.078.694.172,00	206.510.260.515,00	(49.568.433.657,00)	80,64%
2.2	Belanja Modal	4.709.983.000,00	3.829.522.183,20	(880.460.816,80)	81,31%
2.2.1	Belanja Tanah	297.260.000,00	266.516.000,00	(30.744.000,00)	0,00%
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	2.074.105.000,00	1.892.265.046,40	(181.839.953,60)	91,23%
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	2.026.618.000,00	1.409.851.136,80	(616.766.863,20)	69,57%
2.2.4	Belanja Irigasi dan Jaringan	244.500.000,00	198.940.000,00	(45.560.000,00)	-

2.2.5	Belanja Asset Tetap Lainnya	67.500.000,00	61.950.000,00	(5.550.000,00)	-
2.2.6	Belanja Asset Lainnya	-	-	-	-
2.3	Belanja Tidak Terduga	2.717.100.000,00	95.176.365,45	(2.621.923.634,55)	3,50 %
	Jumlah Belanja	950.694.139.790,32	828.005.258.024,09	(122.688.881.766,23)	87,09 %
2.4	Belanja Transfer				
2.4.1	Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten/Kota				
2.4.2	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota				
2.4.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota				
	Jumlah Belanja dan Transfer	950.694.139.790,32	828.005.258.024,09	(122.688.881.766,23)	87,09 %
	Surplus/(Defisit)	958.894.808.877,22	1.066.589.943.156,58	107.695.134.279,36	111,23 %
3	PEMBIAYAAN				
3.1	Penerimaan Daerah				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	-	-	-	-
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Daerah	-	-	-	-

3.2	Pengeluaran Daerah				
3.2.1	Pembentukan Dana cadangan	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	100,00%
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	100,00%
	Pembiayaan Neto	(5.000.000.000,00)	(5.000.000.000,00)	-	100,00%
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	953.894.808.877,22	1.061.589.943.156,58	107.695.134.274,36	111,29 %

3.2 Pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015

Sasaran Pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015

1. Pembinaan Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan di UPTD

Jumlah Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini pada Tahun 2015 adalah sebesar Rp.525.000.000,-. Realisasi fisik mencapai 99,78 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp.523.835.100,- atau 0,22 % dengan sisa anggaran Rp.1.164.900,- Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Dari hasil kegiatan tersebut didapatkan Target Jumlah Aparatur UPTD yang mendapat Pembinaan dikategorikan **Sangat berhasil** karena tercapainya target yang diinginkan yaitu sebesar Rp.525.000.000,- di 7 UPTD Kab/Kota DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Faktor – faktor kurangnya keberhasilan antara lain:

1. Kesadaran Aparatur semakin meningkat.
2. Peningkatan Pembinaan terhadap aparatur.

Adapun sasaran, indicator dan target yang dicapai adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target 2015	Realisasi 2015
1	Terlaksananya Pembinaan administrasi umum, Kepegawaian dan Keuangan di UPTD	1	Jumlah UPTD yang mendapat Pembinaan	100 %	99,78 %

2. Rapat Koordinasi PKB dan BBNKB dengan Instansi Terkait (Kepolisian, Jasa Raharja dan ATPM (Dealer) dll

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini pada Tahun 2015 adalah sebesar Rp.161.844.000,-. Realisasi fisik mencapai 17,44 % dan realisasi keuangan sebesar Rp.28.227.600,- atau 82,66 % dengan sisa anggaran Rp.133.616.400,-. Output dari Kegiatan ini adalah terlaksananya Rapat Koordinasi PKB dan BBNKB dengan Instansi Terkait (Kepolisian, Jasa Raharja dan

ATPM (Dealer) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari hasil kegiatan tersebut didapatkan Target Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dikategorikan **Kurang berhasil** karena target yang diinginkan yaitu sebesar Rp. 161.844.000,-.

Faktor – faktor Kurang keberhasilan antara lain:

1. Turunnya jumlah Penerimaan Pajak Daerah serta Kurangnya Kesadaran dari Masyarakat tentang Pajak di Bangka Belitung.
2. Pertumbuhan ekonomi yang rendah dan tingkat inflasi yang tinggi.

Adapun sasaran, indicator dan target yang dicapai adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target 2015	Realisasi 2015
2	Terlaksananya Rapat Koordinasi PKB dan BBNKB dengan Instansi Terkait (Kepolisian, Jasa Raharja, dan ATPM (Dealer) dll.	2	Tercapainya target bagi hasil pajak daerah	100 %	17,44 %

3. Intensifikasi Sumber-sumber Penerimaan Retribusi Daerah

Jumlah Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini pada Tahun 2015 adalah sebesar Rp.104.559.000,-. Realisasi fisik mencapai 83,96 % dan realisasi keuangan sebesar Rp.87.790.000,- atau 17,04 % dengan sisa anggaran Rp.16.769.000,-. Output dari Kegiatan ini adalah terlaksananya Intensifikasi Sumber-sumber Penerimaan Retribusi Daerah. Persentase Jumlah Target penerimaan Retribusi Pajak Daerah yang diterima dikategorikan **Sangat berhasil** karena mencapai target yang diinginkan sebesar 100%.

Faktor – faktor pendukung keberhasilan antara lain:

1. Dukungan dari SKPD dan Instansi/Perusahaan yang terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan SKPD, Instansi/ Perusahaan yang membidangi dalam penerimaan Retribusi Daerah.

Adapun sasaran, indicator dan target yang dicapai adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target 2015	Realisasi 2015
3	Terlaksananya Intensifikasi Sumber-sumber Penerimaan Retribusi Daerah.	3	Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Daerah	100 %	83,96 %

4. **Monitoring dan Evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB P3).**

Jumlah Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini pada tahun 2015 adalah sebesar Rp.107.849.000-. Realisasi fisik mencapai 87,00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 93.827.000,- atau 13,00 % dengan sisa anggaran Rp.14.022.000,-. Output dari Kegiatan ini adalah terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB P3).

Persentase Jumlah bagi hasil Pajak PBB P3 yang diterima dikategorikan **berhasil** karena mencapai target yang diinginkan.

Faktor – faktor pendukung keberhasilan antara lain:

1. Kerjasama dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB P3).
2. Dukungan dari SKPD dan Instansi/Perusahaan yang terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun sasaran, indicator dan target yang dicapai adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target 2015	Realisasi 2015
4	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi PBB P3	4	Tercapainya Target penerimaan Pajak PBB P3.	100 %	87 %

5. Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Jumlah Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini pada Tahun 2015 adalah sebesar Rp.527.180.000,-. Realisasi fisik mencapai 98,69 % dan realisasi keuangan sebesar Rp.520.250.300,- atau 1,31 % dengan sisa anggaran Rp.6.929.700,-. Output dari Kegiatan ini adalah Tercapainya Target Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah. Persentase Jumlah Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang melaksanakan dikategorikan **Sangat berhasil** karena melampaui target yang diinginkan.

Faktor – faktor pendukung keberhasilan antara lain:

1. Dukungan dan dilaksanakan oleh 34 Satker/SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung.
2. Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan Dinas yang Membidangi intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Adapun sasaran, indicator dan target yang dicapai adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015
5 Terlaksananya Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.	5 Tercapainya target sumber-sumber pendapatan daerah	100 %	98,69 %

6. Operasional Aplikasi SIPKD

Jumlah Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini pada Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 371.800.000,-. Realisasi fisik mencapai 99,03 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 368.175.400,- atau 0,97 % dengan sisa anggaran Rp. 3.624.600,-. Output dari Kegiatan ini adalah terlaksananya Operasional Aplikasi SIPKD. Persentase Jumlah Peserta yang mengikuti dikategorikan **Sangat berhasil** karena mencapai target yang diinginkan.

Faktor – faktor pendukung keberhasilan antara lain:

1. Tingkat kehadiran peserta yang diikuti oleh 34 Satker/SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung.

2. Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan widyaiswara yang datang dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Adapun sasaran, indicator dan target yang dicapai adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target 2015	Realisasi 2015
6	Terlaksananya Operasional Aplikasi SIPKD.	6	Terlatihnya Peserta Didik di 34 SKPD tentang Aplikasi SIPKD	100 %	99,03 %

7. Penghapusan Barang-barang Inventaris

Jumlah Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini pada Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 211.068.290,-. Realisasi fisik mencapai 98,62 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 208.158.683,- atau 1,38 % dengan sisa anggaran Rp. 2.909.607,-. Output dari Kegiatan ini adalah terlaksananya Penghapusan Barang-barang Inventaris. Persentase Jumlah Asset Barang yang diinventaris dikategorikan **Sangat berhasil** karena Asset yang dicatat dapat dimasukkan dalam neraca Asset.

Faktor – faktor pendukung keberhasilan antara lain:

1. Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan seluruh SKPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mencatat seluruh inventarisasi serta menghapus barang-barang inventarisasi seluruh SKPD.

Adapun sasaran, indicator dan target yang dicapai adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target 2015	Realisasi 2015
7	Terlaksananya Penghapusan Barang-Barang Inventaris.	7	Tercatatnya inventarisasi Asset Barang –Barang yang dihapus di seluruh SKPD	100 %	98,62 %

8. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Jumlah Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini pada Tahun 2015 adalah sebesar Rp.115.180.000,-. Realisasi fisik mencapai 84,79 % dan realisasi keuangan sebesar Rp.97.659.540,- atau 15,21 % dengan sisa anggaran Rp.17.520.460,-. Output dari Kegiatan ini adalah terlaksananya Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah. Persentase Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang dibuat dikategorikan **Sangat berhasil** karena Asset Barang Milik Daerah Yang diinventarisir di 34 Satker/SKPD.

Faktor – faktor pendukung keberhasilan antara lain:

1. Kerjasama dan koordinasi yang dalam melakukan laporan inventarisir Asset Barang milik Daerah di 34 Satker / SKPD.

Adapun sasaran, indicator dan target yang dicapai adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015
8 Terlaksananya Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	8 Tercatatnya Laporan Barang Milik Daerah di 34 Satker/ SKPD dan Pemerintah Kab/Kota	100%	84,79%

9. Sensus Barang Milik Daerah

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini pada Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 530.940.000,-. Realisasi fisik mencapai 66,40 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 352.526.798,- atau 33,60 % dengan sisa anggaran Rp.178.413.202,-. Output dari Kegiatan ini adalah terlaksananya Sensus Barang Milik Daerah. Persentase Jumlah barang yang di Sensus milik Daerah dikategorikan **berhasil** karena target yang diinginkan terpenuhi.

Faktor – faktor pendukung keberhasilan antara lain:

1. Peran Aktif seluruh SKPD yang melakukan sensus di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung.
2. Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan seluruh SKPD dan Pemerintah Kab / Kota.

Adapun sasaran, indikator dan target yang dicapai adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target 2015	Realisasi 2015
9	Terlaksananya Sensus Barang Milik Daerah	9	Tercatatnya Sensus Barang Milik Daerah.	100 %	66,40 %

Tabel : Pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini Pemeriksaan BPK (WTP=1, WDP=2, Disclaimer=3)	WTP
2	Meningkatnya kinerja Aparatur pemerintah daerah di dalam instansi DPPKAD maupun di SKPD lainnya	Peningkatan kompetensi aparatur pada SKPD	80%
3	Laporan keuangan SKPD yang baik dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Laporan Keuangan SKPD	30 SKPD
4	memperkuat instansi DPPKAD sesuai tugas pokok dan fungsinya	Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	3
5	sistem informasi keuangan daerah, pendapatan dan asset daerah yang baik dan benar yang dapat diyakini kebenarannya	Sistem Informasi Keuangan Daerah	80%

Tabel Realisasi Kegiatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2015

NO	URAIAN	APBD (Rp)	APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI FISIK (%)	REALISASI		SISA ANGGARAN (Rp)
					KEUANGAN (Rp)	%	Rp
II	BELANJA LANGSUNG						
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	226.800.000	226.800.000	100	147.308.836,-	64,95	(79.491.164)
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	903.000.000	1.105.350.000	100	884.766.464,-	80,04	(220.583.536)

3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	990.780.000	990.780.000	100	922.540.000,-	93,11	(68.240.000)
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	180.000.000	180.000.000	100	145.146.277,-	80,64	(34.853.723)
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	1.154.555.000	1.154.555.000	100	686.145.671,-	59,43	(468.409.329)
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	729.930.000	929.930.000	100	927.686.925,-	99,76	(2.243.075)
7	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	1.282.500.000	1.282.500.000	100	979.794.800,-	76,40	(302.705.200)
8	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/gedung kantor	136.000.000	136.000.000	100	55.893.800,-	41,10	(80.106.200)
9	Penyediaan Bahan Bacaan & Perat. Perundangan	61.573.000	61.573.000	100	58.854.000,-	95,58	(2.719.000)
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	138.820.000	138.820.000	100	115.805.500,-	83,42	(23.014.500)
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	115.048.000	115.048.000	100	103.007.100,-	89,53	(12.040.900)
12	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	546.000.000	846.000.000	100	791.789.967,-	93,59	(54.210.033)
13	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi	2.447.250.000	2.447.250.000	100	2.382.900.000,-	97,37	(64.350.000)
14	Jasa Pemeliharaan Sistem Penggajian PNS SKPD di Lingkungan Provinsi Kep. BABEL	85.307.920	85.307.920	100	60.518.100,-	70,94	(24.789.820)
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
1	Pembangunan Gedung Musholla	691.906.000	691.906.000	100	33.374.000 ,-	4,82	(658.532.000)
2	Pembangunan Landscape Kantor UPTD/Samsat Kab. Belitung	1.033.803.000	1.033.803.000	100	1.009.896.136,80 ,-	97,69	(23.906.863,20)
3	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	986.230.000	986.230.000	100	887.317.821,40 ,-	89,97	(98.912.178,60)
4	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	181.190.000	181.190.000	100	167.413.400,-	92,40	(13.776.600)
5	Pembangunan Tempat Parkir Kendaraan	224.880.000	224.880.000	100	208.406.000	92,67	(16.474.000)
6	Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung kantor	1.002.792.500	1.302.792.500	100	1.096.510.775	84,17	(206.281.725)
7	Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	2.053.440.000	2.053.440.000	100	1.053.037.150,-	51,28	(1.000.402.850)

8	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	159.840.000	159.840.000	100	154.464.000,-	96,64	(5.376.000)
9	Pembangunan Gudang Barang	235.975.000	235.975.000	100	224.460.250,-	95,12	(11.514.750)
10	Pengadaan Peralatan Kerja Pelayanan Samsat UPTD	1.214.455.000	1.214.455.000	100	1.097.796.925,-	90,39	(116.658.075)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur							
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	355.000.000	355.000.000	100	336.757.400,-	94,86	(18.242.600)
2	Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kep. Bangka Belitung	19.836.500	19.836.500	100	-	0,00	(19.836.500)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	155.926.500	163.800.000	100	97.407.040,-	59,47	(66.392.960)
2	Rakor Koordinasi PKB dan BBN-KB dengan Instansi Terkait (Kepolisian, Jasa Raharja dan ATPM (Dealer), dll)	161.844.000	161.844.000	100	28.227.600,-	17,44	(133.616.400)
3	Pembinaan Administrasi Umum Kepegawaian dan keuangan di UPTD serta Koordinasi dan Konsultasi dengan Kabupaten/Kota	425.000.000	525.000.000	100	523.835.100,-	99,78	(1.164.900)
4	Intensifikasi sumber-sumber penerimaan retribusi daerah	104.559.000	104.559.000	100	87.790.000	83,96	(16.769.000)
5	Konsultasi/ Koordinasi dan Bimbingan Teknis Pajak Daerah	142.236.000	142.236.000	100	110.643.600	77,79	(31.592.400)
6	Monitoring dan Evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB P3)	107.849.000	107.849.000	100	93.827.000	87,00	(14.022.000)
7	Rakor Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P3 Kab/Kota	85.553.040	85.553.040	100	69.931.200	81,74	(15.621.840)
8	Koordinasi dan Konsultasi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain	98.342.000	98.342.000	100	85.733.300	87,18	(12.608.700)
9	Rekonsiliasi Penerimaan Retribusi Daerah	37.720.000	37.720.000	100	32.000.000	84,84	(5.720.000)

10	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi Perpanjangan MTA	268.102.400	268.102.400	100	230.544.566	85,99	(37.557.834)
11	Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemda	112.752.800	112.752.800	100	55.139.700	48,90	(57.613.100)
E	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
1	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	68.485.220	68.485.220	100	43.184.700,-	63,06	(25.300.520)
F	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah						
1	Pengadaan Lahan di Samsat Bangka Selatan	399.717.500	399.717.500	100	348.978.360,-	87,31	(50.739.140)
G	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah						
1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	963.450.000	1.136.850.000	100	1.045.566.350,-	91,97	(91.283.650)
2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	294.157.000	294.157.000	100	240.283.700,-	81,69	(53.873.300)
3	Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	691.350.000	527.180.000	100	520.250.300,-	98,69	(6.929.700)
4	Operasional Aplikasi SIPKD	221.800.000	371.800.000	100	368.175.400,-	99,03	(3.624.600)
5	Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK-SKPD	190.990.000	190.990.000	100	177.316.599,-	92,84	(13.673.401)
6	Penghapusan Barang-barang Inventaris	117.523.160	211.068.290	100	208.158.683,-	98,62	(2.909.607)
7	Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2016	309.941.800	209.941.800	100	186.237.367,-	88,71	(23.704.433)
8	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	115.180.000	115.180.000	100	97.659.540,-	84,79	(17.520.460)
9	Penyusunan Harga Satuan Barang dan Jasa (HSBJ) Prov. Kep. Bangka Belitung	169.893.200	169.893.200	100	134.337.850,-	79,07	(35.555.350)

10	Penyusunan dan Penataan Arsip SP2D	168.135.000	168.135.000	100	118.499.500,-	70,48	(49.635.500)
11	Pembinaan Teknis Bendahara/ Penyimp anan Barang dan Pengurus Barang	184.786.760	184.786.760	100	140.519.700,-	76,04	(44.267.060)
12	Monitoring atau Pengawasan Barang Milik Daerah atau Asset Daerah	316.961.400	316.961.400	100	243.323.398,-	76,77	(73.638.002)
13	Penyusunan Revisi Perda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	383.323.000	383.323.000	100	304.111.956,-	79,34	(79.211.044)
14	Penyusunan Perda dan Pergub tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	190.123.000	208.423.000	100	153.955.047,-	73,87	(54.467.953)
15	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	-	325.000.000	100	128.390.950,-	39,50	(196.609.050)
16	Penyusunan Perda tentang Lain-lain PAD yang Sah	-	122.930.000	100	108.583.200,-	88,33	(14.346.800)
17	Sensus Barang Milik Daerah	-	530.940.000	100	352.526.798,-	66,40	(178.413.202)
18	Penilaian Barang Milik Daerah/Asset Daerah	-	309.086.800	100	-	0,00	(309.086.800)
19	Penyusunan Sistem dan Prosedur (sisdur) Pengelolaan Keuangan Daerah	-	287.135.000	100	239.177.980,-	83,30	(47.957.020)
20	Sinkronisasi Penyusunan Anggaran Kas dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK)	-	76.850.000	100	-	0,00	(76.850.000)
H	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota						
1	Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang APBD dan Perubahan APBD	352.888.000	379.116.000	100	325.601.300,-	85,88	(53.514.700)
2	Evaluasi Raperda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	96.270.280	96.270.280	100	73.135.000,-	75,97	(23.135.280)
3	Rapat Koordinasi Pembinaan Keuangan Pemerintah Kab/Kota	214.740.000	214.740.000	100	115.729.000,-	53,89	(99.011.000)
I	Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah						
1	Razia PKB dan BBNKB Roda Dua dan Roda Empat	466.567.200	466.567.200	100	397.262.300,-	85,15	(69.304.900)
2	Sosialisasi Perda Pajak Daerah	52.280.000	52.280.000	100	50.847.000,-	97,26	(1.433.000)

3	Operasional dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah	1.138.471.672	591.471.672	100	421.915.700,-	71,33	(169.555.972)
4	Operasional Samsat Keilling	356.900.000	356.900.000	100	260.571.950,-	73,01	(96.328.050)
5	Penyusunan Pergub tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2016	93.440.000	93.440.000	100	55.851.978,-	59,77	(37.588.022)
JUMLAH BELANJA LANGSUNG		26.422.044.352	29.101.179.282	100	22.921.513.810,20,-	78,76	(6.179.665.471,80)
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG		37.559.919.474,70	38.587.487.480,50	100	36.462.707.491,25	94,49	(2.124.779.989,25)
JUMLAH BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG		63.981.963.826,70	67.686.666.762,50	100	59.384.221.301,45	87,21	(8.302.445.461,05)

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun anggaran 2015. Pengukuran kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015, mencakup Pengukuran Pencapaian Sasaran yang menggambarkan kualitas capaian keluaran (output) atau hasil (outcome) dari kegiatan yang dilaksanakan tahun 2015.

Dari uraian diatas, maka dalam pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat disimpulkan antara lain :

- 1) Pembinaan Aparatur dan pelaksanaan kegiatan tahunan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilaksanakan dengan baik dan berkualitas dengan mengoptimalkan pelaksanaan tugas/kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan pada unit-unit kerja DPPKAD melalui koordinasi yang efektif dan berkesinambungan.
- 2) Peningkatan koordinasi antar unit kerja dan instansi terkait dalam rangka peningkatan dan penggalan Pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset Daerah.
- 3) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan operasional peningkatan Pendapatan, pengelolaan keuangan dan Asset Daerah.
- 4) Pendayagunaan dan pembinaan aparatur yang berkualitas, perlu didukung oleh faktor internal dan eksternal organisasi.
- 5) untuk peningkatan Pendapatan pengelolaan keuangan dan asset Daerah yang efektif dan berhasil guna diperlukan penyatuan dan

pemahaman visi dan misi organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja masing-masing.

- 6) Pendayagunaan sumber daya manusia yang merupakan potensi peningkatan pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah harus dioptimalkan.

Demikian LAKIP ini disampaikan, dan semoga dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan tugas selanjut agar menjadi lebih baik, terima kasih.

Pangkalpinang, FEBRUARI 2015
KEPALA DINAS,



Drs. H. YULIZAR ADNAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19630717 198903 1 009